

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN PERIODE 2019 – 2021 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Bilqis Nabilah¹, Nadi Hernadi Moorcy²

^{1,2}Prodi Manajemen Universitas Balikpapan

Bilqisnabilah4@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pemerintah kota Balikpapan periode 2019 - 2021 yang diukur berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, capaian kinerja penyerapan anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kota Balikpapan pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, observasi (pengamatan langsung), dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dengan persentase yang berbeda namun dalam kriteria efektivitas yang sama yaitu periode 2019 sebesar 86% (cukup efektif), periode 2020 sebesar 90% (cukup efektif), dan periode 2021 sebesar 84% (cukup efektif). Sedangkan pada tingkat efisiensi dengan hasil yang bervariasi yaitu periode 2019 sebesar 95% (kurang efisien), periode 2020 sebesar 87% (cukup efisien), dan periode 2021 sebesar 90% (cukup efisien). Capaian kinerja penyerapan anggaran terserap dengan baik namun masih terdapat beberapa belanja yang tidak mencapai target dikarenakan kebijakan yang ada serta realisasinya sesuai kebutuhan periode berjalan.

Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Penyerapan anggaran, Kinerja Keuangan Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to determine out how well the financial performance of the Balikpapan city government for the period 2019 - 2021 is measured based on effectiveness ratios, efficiency ratios, achievement of budget absorption performance. The type of research used in this study is quantitative descriptive. The data processed is a report on the realization of the Balikpapan city government budget from 2019 to 2021. The data collection techniques used in this study is documents, observation (direct observation), and literature study. The data analysis technique used in this study is descriptive statistics.

The results identify that the level of effectiveness is with a different percentage but within the same effectiveness criteria, the 2019 period was 86% (effective enough), the 2020 period was 90% (effective enough), and the 2021 period was 84% (effective enough). Where as at the level of efficiency with varying results, the 2019 period at 95% (less efficient), the 2020 period at 87% (quite efficient), and the 2021 period at 90% (quite efficient). The budget absorption performance achievements were well absorbed, but there were still some expenditures that did not reach the target due to existing policies and their realization according to the needs of the current period.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, budget absorption, Government Financial Performance.

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan/akuntansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang mana dibuat laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bukti pertanggungjawabannya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja yang dimulai dari penentuan program dan kegiatan hingga jumlah anggaran yang harus disediakan.

Anggaran merupakan perkiraan pencapaian yang akan diraih selama rentang waktu tertentu yang dinyatakan dalam skala finansial. Ketetapan yang disepakati oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perencanaan anggaran ini perlu dilakukan seoptimal mungkin karena apabila perencanaan dalam anggaran ini lemah maka dapat mengakibatkan adanya underfinancing dan overfinancing yang dapat berdampak pada keefektifan dan keefisienan anggaran. (Hasnita, 2021).

Penyerapan anggaran yang baik dapat dinilai dengan melihat target yang telah disusun di awal tahun anggaran. Namun dalam realisasinya terdapat banyak Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mencapai target. Kendala yang dihadapi antara lain anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, serta masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia sehingga sasaran pembangunan belum bisa optimal. (Basariyah, 2017)

Keterlambatan penyerapan anggaran juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penumpukan realisasi pada akhir tahun periode berjalan seperti yang tertera pada penelitian, menunjukkan bahwa pada penyerapan anggaran tahun 2018 triwulan I hanya 7,6% dari target 20%, lalu pada triwulan II naik menjadi 41% dari target 60%, dan triwulan 3 yang mencapai 74% mendekati akhir periode. (Novita, 2020)

Tolak ukur kinerja anggaran dapat dilihat dari besaran anggaran atau realisasi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pada tahun anggaran berjalan hingga akhir tahun anggaran. Dari penyerapan anggaran tersebut, kita dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang dilakukan.

Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Matondang, 2022). Tingkat efektivitas merupakan tujuan pemerintah yang ditargetkan apabila berhasil dicapai maka terdapat nilai efektivitasnya dikarenakan tujuan lebih bernilai dari sekedar besarnya uang yang dihabiskan (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang Efektivitas, Efisiensi, dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019 – 2021 Pemerintah Kota Balikpapan'

KAJIAN TEORI

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan keluaran hasil dari suatu kegiatan yang akan atau telah di capai sehubungan dengan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Mahmudi, 2016, p. 25)

1. Tujuan Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Daerah

Untuk memenuhi 3 tujuan dalam Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2012), yaitu :

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

2. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mengukur kinerja pemerintah daerah harus sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah daerah tersebut (Mahsun, 2012). Indikator kinerja keuangan sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (input), Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator proses (proses), Mengukur kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Indikator keluaran (output), Capaian yang diharapkan langsung dari kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
- d. Indikator hasil (outcome), Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- e. Indikator Manfaat (benefit), Segala sesuatu yang berkaitan pada tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator dampak (impact), Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Penyerapan Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 menerangkan bahwa penyerapan anggaran merupakan perbandingan akumulasi realisasi anggaran dengan realisasi pagu anggaran. Indikator Penyerapan anggaran proporsionalnya ditetapkan target triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%.

Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai hasil yang diharapkan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output (Mahmudi, 2015, p. 21)

Pengukuran Efektivitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan, Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Rentang Capaian Kinerja	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Efisiensi

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (Mahmudi, 2015, p. 21)
 Pengukuran efisien menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan, Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisien anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Efisiensi

Rentang Capaian Kinerja	Kategori
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berpedoman pada Pengukuran Efektivitas, untuk menilai seberapa besar efektivitas capaian dari realisasi anggaran. Rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

Pengukuran Efisiensi Belanja, untuk menilai seberapa besar efisiensi capaian dari realisasi anggaran. Rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 No. 1, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. Peneliti memperoleh data serta mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan capaian kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan pada periode 2019 – 2021, adapun hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Efektivitas Anggaran
 Pemerintah Kota Balikpapan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2019	2.786.277.578.346,00	2.405.320.741.662,33	86%	cukup efektif
2020	2.392.415.488.939,91	2.143.936.514.177,38	90%	cukup efektif
2021	2.826.437.016.519,00	2.375.021.817.795,28	84%	cukup efektif

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efektivitas pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun 2019 – 2021 memiliki persentase yang mengalami kenaikan dan penurunan namun dengan kategori yang sama yaitu cukup efektif. Pada periode 2019 persentase efektivitas sebesar 86% (cukup efektif), lalu mengalami kenaikan persentase pada periode 2020 sebesar 90% (cukup efektif), serta mengalami penurunan persentase pada periode 2021 sebesar 84% (cukup efektif). Hal yang menyebabkan persentase yang mengalami kenaikan dan penurunan namun masih masuk dalam kategori yang sama dikarenakan realisasi dan target pada setiap periode nya berbeda-beda. Dengan realisasi yang mendekati atau bahkan melampaui target yang membuat persentase mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya apabila realisasi jauh dibawah target maka persentasenya mengalami penurunan.

Tabel 4. Analisis Efisiensi Anggaran
Pemerintah Kota Balikpapan

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2019	2.285.504.835.194,33	2.405.320.741.662,00	95%	kurang efisien
2020	1.864.524.887.247,97	2.143.936.514.177,00	87%	cukup efisien
2021	2.134.051.495.995,96	2.375.021.817.795,00	90%	cukup efisien

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun 2019 – 2021 memiliki persentase yang mengalami kenaikan dan penurunan namun pada periode 2019 masuk ke dalam kategori kurang efisien sedangkan periode 2020 hingga 2021 masuk ke dalam kategori cukup efisien. Pada periode 2019 persentase efisiensi sebesar 95% (kurang efisien) dikarenakan adanya pemborosan pada anggaran belanja langsung yaitu belanja pegawai dengan tingkat persentase sebesar 93,10%, lalu pada periode 2020 sebesar 87% (cukup efisien), dan pada periode 2021 sebesar 90% (cukup efisien). Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja langsung mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran apabila penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar maka pengelolaan anggaran tersebut belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil analisis, capaian kinerja penyerapan anggaran pemerintah kota Balikpapan periode 2019 – 2021 masuk dalam kriteria baik dengan rata –rata persentase dalam laporan realisasi anggaran tersebut berada di atas 70% sehingga melebihi target nya. Anggaran pada periode 2019 – 2021 dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai 171 Program yang terdiri atas 84 program prioritas dan 87 program penunjang untuk mencapai 10 sasaran yang menjadi indikator kinerja utama kota Balikpapan. Namun beberapa anggaran masih kurang dalam penyerapannya yaitu tahun 2019 terdapat pada belanja operasi yaitu belanja bantuan sosial dengan persentase 60,69% diperuntukan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni meskipun persentasenya rendah namun belanja bantuan sosial ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.136.733.000 dibandingkan pada tahun 2018, pada belanja modal yaitu belanja tanah

dengan persentase 20,58% dikarenakan di tahun 2019 belanja modal tanah ini diperuntukkan untuk pengadaan taman bekapai namun tidak dapat direalisasikan dari anggaran sebesar Rp. 2.683.131.250 karena status tanah bekapai yang masih dalam proses pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta untuk rencana pengadaan tanah untuk bangunan Institut Teknologi Kalimantan tidak dapat direalisasikan karena masa berlaku penetapan lokasi berakhir di Desember 2019 sehingga tidak sempat melakukan mekanisme pembayaran. Pada belanja tak terduga dengan persentase 16,60% dikarenakan kebutuhan penanganan atas hal yang tidak terduga di kota Balikpapan hanya disalurkan untuk 5 kejadian seperti, Bencana Kebakaran pemukiman di Jl.Sulawesi RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 407.525.000, Bencana Tanah Longsor di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota sebesar Rp. 1.370.660.000, Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB atas nama Purwanto Budi Utomo sebesar Rp. 12.000.000, Pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama PT. Wijaya Karya Realty sebesar Rp. 1.746.154, Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pemenang lelang atas nama Edwin Adiwinata sebesar Rp. 73.795.000 .

Persentase anggaran yang penyerapannya kurang tahun 2020 terdapat pada belanja modal yaitu belanja tanah dengan persentase 0,53% dikarenakan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung senilai Rp. 9.205.843.600 tidak dapat direalisasikan secara maksimal karena Proses pengadaan tanah stadion terbentur dengan regulasi yang ada. Berdasarkan UU No.2 tahun 2012 bahwa pengadaan Lahan di atas 5 Ha dilaksanakan oleh satgas pengadaan tanah (BPN) namun Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (BPN) menyatakan tidak dapat melakukan proses pengadaan lahan dikarenakan sudah ada bangunan stadion di lahan tersebut. Pada tahun 2020 untuk belanja tak terduga mengalami peningkatan dikarenakan adanya wabah covid 19 maka dari itu anggaran direalisasikan sebesar Rp. 120.421.985.933. Realisasi tersebut digunakan oleh beberapa OPD terkait langsung dalam penanganan pandemi Covid untuk fokus penanganan kesehatan, fokus penanganan dampak ekonomi dan fokus jaring pengaman sosial.

Persentase anggaran yang penyerapannya kurang tahun 2021 pada dikarenakan dan aset tetap lainnya dengan persentase 61,73% dikarenakan pengadaan aset tetap lainnya sudah dianggarkan di tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas, efisiensi serta capaian kinerja penyerapan anggaran periode 2019 – 2021 Pemerintah Kota Balikpapan, dapat dilihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas, efisiensi dan penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Kriteria Efektivitas Pemerintah Kota Balikpapan Periode 2019 – 2021 mempunyai tingkat efektivitas dengan persentase yang bervariasi namun dalam kriteria yang sama. Tingkat efektivitas tertinggi pada periode 2020 dengan persentase 90% (cukup efektif), tingkat efektivitas sedang pada periode 2019 dengan persentase 86% (cukup efektif), serta tingkat Efektivitas terendah pada periode 2021 dengan persentase 84% (cukup efektif)
2. Kriteria efisiensi Pemerintah Kota Balikpapan Periode 2019 -2021 mempunyai tingkat efisiensi yang bervariasi. Tingkat efisiensi tertinggi pada periode 2020

dengan persentase 87% (cukup efisien), tingkat efisiensi sedang pada periode 2021 dengan persentase 90% (cukup efisien), serta tingkat efisiensi terendah pada 2019 dengan persentase 95% (kurang efisien) dan pada periode ini belum berhasil menggunakan dana minimum untuk mencapai sasaran.

3. Capaian kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan Periode 2019 – 2021 sudah terarah namun masih terdapat beberapa belanja yang penyerapannya kurang hal itu dikarenakan kebijakan serta penyesuaian kebutuhan pada periode berjalan. Seperti pada tahun 2019 belanja modal yaitu belanja tanah dengan persentase 20,58% untuk belanja tanah tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan untuk belanja tidak terduga dikarenakan

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, A., Situmorang, M., & Octavianty, E. (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok*. 1–15.
- Basariyah, S. (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. 5, 63–74.
- Dermawan, S., Djahotman, P., & Gunawan. (2017). *Akuntansi Manajemen Edisi 2* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Erlina, Omar, S. R., & Rasdianto. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1320–1329. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.395>
- Jumaroh, & Sugiharti Rr. Retno. (2021). *Efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja : studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung*. 1(1), 55–68.
- Lantang, K. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso*. 18(2), 20–29.
- Lisnawati, & Priyono, N. (2021). *Efisiensi dan Efektifitas Partisipasi Anggaran pada SKPD DISPERPA Kabupaten Magelang*. 3(1), 100–109.
- Mahmudi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Ketiga)*. BPFE.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018*. 9(2), 982–992.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Matondang, E. S. (2022). *Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Helvetia*. 22(1), 94–102.
- Novita, H. (2020). *Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja di Wilayah POLDA JATIM*. 4(10), 1459–1471.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan*

Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1398–1408.

- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). *Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat*. 10(1), 84–88.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni. (2020). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019*. 11(1), 1–10.
- Salsabila, & Yayuk, W. E. (2022). *Efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat*. 2(5), 350–359.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi kedua). UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Wiwik, S., Purwo, A., & Rihfenti, E. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Nusa Litera Inspirasi.